

OMBUDSMAN TEMUKAN "MARK UP" NILAI PPDB DI PADANG, ANGGOTA DPRD: KEPSEKNYA HARUS BERTANGGUNG JAWAB

Selasa, 28 Juni 2022 - Marisya Fadhila

Covesia.com - Ombudsman Perwakilan Sumbar menemukan adanya kecurangan dalam PPDB SMA dengan cara mark up (mengangkat) nilai rapor yang dilakukan oleh salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang.

Menanggapi hal tersebut Anggota DPRD Kota Padang Fraksi PKS, Muharlion mengatakan tentu yang paling bertanggung jawab atas kasus ini adalah kepala sekolah dan pasti akan diusut oleh pengawas.

"Dan kalau memang terjadi pastinya akan mencoreng pendidikan Kota Padang, karena SMPN 1 adalah salah satu sekolah terfavorit di kota ini," ujarnya kepada wartawan, Senin (27/6/2022).

Ini juga akan menjadi catatan khusus bagi DPRD Kota Padang, Selanjutnya katanya akan mendorong Komisi IV DPRD Kota yang membidangi pendidikan untuk memanggil Disdik Kota Padang untuk mempertanyakan kasus ini.

"Karena saya juga mendapat slentingan dari status media sosial dari salah satu kabid dengan tulisan hati-hati dengan adanya kecurangan lapor," jelasnya.

Jadi baginya kalau memang itu terbukti maka harus diberikan sanksi, karena yang dikorbankan adalah anak-anak yang akan mendaftar saat PPDB tersebut.

"Kita berharap, karena saat ini akan ada pertemuan dengan dinas pendidikan, kawan-kawan dari Komisi IV untuk menanyai soal perkara ini," tutupnya.

Sebelumnya Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyarankan Dinas Pendidikan (Disdik) menunda pengumuman hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMA SMK 2022.

Saran ini dituangkan oleh Ombudsman Perwakilan Sumbar ke Disdik Sumbar melalui sebuah surat yang ditandatangani langsung oleh Kepala Ombudsman perwakilan Sumbar, Yefri Heriani tertanggal 26 Juni 2022.

Dimana isi dari surat saran itu adalah Pertama, dilakukan penundaan pengumuman hasil pendaftaran yang dalam jadwalnya yang akan diumumkan pada Minggu (26/6/2022) kemarin.

